



PENGARUH ASAS TRILOGI KEPEMIMPINAN DAN AKSEBILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP PENERAPAN TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN

Sri Ayem^{1,*} Misra Enumbi²
Akuntansi, Ekonomi
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
*email: sriayemfeust@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History

Submission: 12
November 2023
Reviewed: 13 November
2023
Accepted: 16 Maret
2024
Publish: 30 Juni 2024

Keyword:

Leadership Trilogy,
Accessibilitu of
Financial Statements,
Financial Reporting
Transparency.

ABSTRACT

This research aims to examine and analyze the influence of the Leadership Trilogy Principle and Accessibility of Financial Reports on the Implementation of Financial Reporting Transparency in SKPDs in the Yogyakarta Special Regional Government. The population of this study consisted of 89 respondents, these 89 respondents were selected as research samples based on purposive sampling, so there were 89 research samples. The data analysis method used is multiple linear regression analysis. The research results show that the leadership trilogy has a positive effect on the transparency of financial reporting and the accessibility of financial reports also has a positive effect on the transparency of financial reporting.

Pendahuluan

Sekarang perhatian semakin besar terhadap praktek akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga publik, baik akuntansi sektor pemerintah maupun lembaga publik non pemerintah. Lembaga publik mendapat tuntutan dari masyarakat untuk dikelola secara akuntabilitas dan transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Laporan keuangan dari instansi pemerintahan merupakan salah satu bentuk dari pertanggungjawaban untuk menciptakan akuntabilitas dan transparansi di pemerintah pusat, provinsi maupun daerah. Akuntabilitas dan transparansi telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah sejak tahun 1997 (Herlina *et al*, 2021).

Reformasi manajemen keuangan daerah di Indonesia ditandai dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dengan tujuan pelaksanaan otonomi daerah tersebut secara umum adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah, memperbaiki transparansi dan akuntabilitas publik atas pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan publik, meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik serta mendorong demokratisasi di daerah (Mahmudi, 2010). Setiap daerah harus mampu menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan dari daerah yang bersangkutan seperti laporan realisasi anggaran, laporan posisi keuangan, catatan atas laporan keuangan. Dengan adanya reformasi di bidang pengelolaan keuangan yang mengarahkan untk

mengimplementasikan good governance maka pemerintah daerah tidak dapat lagi menutup-nutupi kondisi keuangan dari public (Wulaningrum & Pinanto, 2020).

Upaya transparansi ini bisa dilakukan melalui pelaksanaan akuntansi dan pembuatan laporan keuangan. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka informasi laporan keuangan juga harus dipublikasikan agar masyarakat selaku stakeholder mengetahui dan bisa melakukan analisa yang diperlukan dalam rangka mengevaluasi kinerja (Mahmudi, 2010). Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Keuangan yang dikelola suatu lembaga publik harus transparan atau terbuka untuk diketahui warganya transparansi keuangan lembaga publik sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan (*trust*). Pemerintah yang terbuka menyampaikan informasi keuangan kepada publik lebih dipercaya dibanding pemerintah yang relatif tertutup. Pemerintah yang menutup informasi keuangan dapat diduga kurang berkompeten dalam mengelola dan melaporkan keuangan. Umumnya pemerintah yang tertutup tidak dapat menjelaskan mengapa kinerja pembangunan mereka kurang baik dan belum berhasil. Oleh sebab itu, diperlukan Transparansi pengelolaan keuangan daerah berupa penyediaan informasi pengelolaan keuangan daerah di situs resmi pemerintah daerah, merupakan salah satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi, karena adanya transparansi pengelolaan keuangan diyakini dapat meningkatkan pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Choirunnisa, 2021).

Cara yang ditempuh untuk mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan adalah dengan mengharuskan pemerintah untuk menyusun suatu laporan keuangan yang dilakukan dengan melaksanakan kegiatan akuntansi keuangan daerah. Agar transparansi dan akuntabilitas dapat terjamin, diperlukannya suatu sistem akuntansi yang baik, dan sistem tersebut dijalankan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD). Sistem akuntansi keuangan daerah bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta memudahkan pengendalian yang efektif atas seluruh asset, hutang, dan ekuitas dana (Andriyani *et al*, 2016).

Fenomena yang terjadi di daerah Kota Yogyakarta sendiri ada kasus mengenai pengadaan barang dan jasa pada tahun 2022. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti (HS) mengintervensi dalam setiap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta. KPK mendalami hal tersebut melalui pemeriksaan saksi Kepala Bagian Layanan Pengadaan Kota Yogyakarta Joko Budi Prasetyo untuk tersangka HS dan kawan-kawan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (12/9), dalam penyidikan kasus dugaan suap pengurusan perizinan di wilayah Pemkot Yogyakarta. Selain itu, KPK juga memeriksa dua saksi lainnya dalam penyidikan kasus tersebut, yakni GM Hotel Pesonna Malioboro Joko Suparno Widiyanto, dan pihak swasta Tomy Galih Prasetyo alias Tomy Sudjiro. Ali mengatakan tim penyidik mengonfirmasi pengetahuan dua saksi itu mengenai pengurusan perizinan yang diduga ada transaksional dengan oknum di Pemkot Yogyakarta. KPK juga memanggil seorang saksi lainnya, yaitu Daniel Feriyanto selaku pihak swasta. Namun, ia tidak memenuhi panggilan tanpa mengonfirmasi. KPK telah menetapkan HS bersama dua orang lainnya sebagai tersangka penerima suap, yakni Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Yogyakarta Nurwidhihartana (NWH), dan Triyanto Budi Yuwono (TBY) sekretaris pribadi merangkap ajudan HS. Sementara, pemberi suap ialah Oon Nushono (ON) selaku Vice President Real Estate PT Summarecon Agung (SA) Tbk yang saat ini sudah berstatus terdakwa dan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Yogyakarta. Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan pada tahun 2019 tersangka ON, melalui Dandan Jaya Kartika selaku Direktur Utama PT Java Orient Property (JOP), anak perusahaan PT SA,

mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan (IMB) dengan mengatasnamakan PT JOP untuk pembangunan apartemen Royal Kedhaton di kawasan Malioboro. Pembangunan apartemen tersebut masuk dalam wilayah cagar budaya di Pemkot Yogyakarta. Permohonan izin berlanjut di 2021, dimana ON dan Dandan Jaya diduga melakukan pendekatan dan komunikasi secara intens serta membuat kesepakatan dengan HS yang saat itu menjabat sebagai Wali Kota Yogyakarta periode 2017-2022. KPK menduga ada kesepakatan antara ON dan HS, di antaranya HS berkomitmen akan selalu mengawal permohonan IMB tersebut dengan memerintahkan Kadis PUPR, agar segera menerbitkan IMB yang dilengkapi dengan pemberian sejumlah uang selama pengurusan izin berlangsung (Antarayogya, 2022).

Penerapan transparansi pelaporan keuangan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama yang mempengaruhi penerapan transparansi pelaporan keuangan di Kota Yogyakarta adalah Trilogi Kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi hal yang sangat penting bahkan menentukan dalam pencapaian suatu tujuan kelompok atau organisasi, untuk mengarahkan dan mengatur orang-orang untuk mencapai tujuan, karena sebaik apapun sumberdaya yang dimiliki organisasi, tanpa adanya pemimpin yang mampu mengelola, maka organisasi tidak akan dapat berjalan pada arah yang tepat. Kepemimpinan merupakan salah satu dari fungsi administrasi dan manajemen. Kepemimpinan merupakan kemampuan, kecakapan, keahlian yang dimiliki oleh seorang pemimpin untuk mempengaruhi orang lain dalam rangka mencapai tujuannya (Herlina *et al.*, 2021).

Pemimpin merupakan posisi sentral dalam organisasi yang akan menentukan maju mundurnya organisasi, berhasil tidaknya tujuan, tumbuh berkembangnya organisasi bahkan hidup matinya organisasi sangat tergantung pada seorang pemimpin. Oleh karena itu pemimpin harus menggunakan dayanya (kemampuan) sedemikian rupa dalam mencapai tujuan organisasi. Karena era globalisasi penuh dengan tantangan dan perubahan, maka untuk menghadapi dan memenangkannya seorang pemimpin harus bisa mempertahankan nilai-nilai dasar yang dianut oleh Bangsa Indonesia serta taat pada Pancasila dan UUD 1945 yang menjadi pedoman atau petunjuk bagi pemimpin dalam menjalankan roda organisasi (Marliyani, 2019).

Faktor kedua yang mempengaruhi penerapan transparansi pelaporan keuangan di Kota Yogyakarta adalah aksesibilitas laporan keuangan. Aksesibilitas laporan keuangan ialah kemudahan bagi para penggunanya agar bisa mencermati laporan keuangan pemerintah daerah. Sudah sepatutnya pemerintah daerah bisa mempermudah akses untuk pengguna laporan keuangan, bukan sekadar ke lembaga legislatif maupun lembaga pengawas, melainkan ke masyarakat yang memercayai dana mereka dikelola oleh pemerintah (Molle, 2022). Hal ini dapat dilakukan dengan cara memfasilitasi berbagai pihak yang berkepentingan agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah. Publikasi laporan keuangan oleh pemerintah daerah melalui surat kabar, internet, atau cara lain nampaknya belum menjadi hal yang umum bagi sebagian daerah. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Sri Ayem, 2017).

Berdasarkan Ayem (2017) aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan Tresnawati, Syilvia., Rahayu, Sri. (2023) Aksesibilitas secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah di SKPD kota Bandung. sedangkan berdasarkan Anisa Nafa Dwiyantri (2022) Aksesibilitas tidak berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan. Penelitian ini hanya berfokus pada pembahasan mengenai aksesibilitas pelaporan keuangan dipengaruhi penerapan transparansi pelaporan keuangan (Andriyani *et al.*, 2016).

Teori Agensi

Hubungan keagenan adalah sebuah kontrak dimana satu atau lebih (principal) menyewa orang lain (agent) untuk melakukan beberapa jasa untuk dengan mendelegasikan beberapa

wewenang pembuatan keputusan kepada agen (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Hehanussa, 2015). Permasalahan yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan sering disebabkan oleh adanya benturan kepentingan antara kepentingan manajemen dengan kepentingan stakeholder. Manajemen tidak selalu bertindak untuk kepentingan stakeholder, namun seringkali manajemen bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka dan mengamankan posisi mereka tanpa memandang bahaya yang ditimbulkan terhadap stakeholder lain, misalnya karyawan, investor, kreditor dan masyarakat (Indria, 2018).

Dilihat dari sudut pandang teori keagenan diatas, hubungan antara masyarakat dengan pemerintah daerah adalah seperti hubungan antara principal dan agent. Masyarakat adalah principal dan pemerintah daerah adalah agent. Principal memberikan wewenang pengaturan kepada agent dan memberikan sumber daya kepada agent (dalam bentuk pajak dan lain sebagainya). Pemerintah daerah selaku agent memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi sebagai wujud dari pertanggungjawaban atas wewenang yang sudah diberikan, pemerintah daerah harus memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap masyarakat. Dengan begitu masyarakat dapat menilai, mengukur dan mengawasi sampai sejauh mana pemerintah daerah tersebut mengelola sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan (Indria, 2018).

Teori Sinyal

Teori sinyal (*Signaling Theory*) menjelaskan pentingnya sebuah perusahaan memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal karena terdapat asimetri informasi antara manajer dan pemegang saham. Informasi yang ada dalam perusahaan merupakan sinyal bagi para pelaku pasar untuk melakukan investasi dan mempengaruhi prospek perusahaan di masa depan. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi asimetri informasi adalah dengan memberikan sinyal yang baik pada pihak luar berupa informasi keuangan yang dapat dipercaya sehingga akan mengurangi ketidakpastian mengenai prospek perusahaan di masa depan (Erawati & Latifah, 2018).

Teori sinyal menjelaskan mengenai bagaimana seharusnya perusahaan memberikan sinyal pada pengguna laporan keuangan. Apabila laba yang diperoleh perusahaan menurun, hal tersebut akan menjadi sinyal bahwa kinerja perusahaan memburuk, sebaliknya apabila laba perusahaan meningkat maka akan menjadi sinyal bahwa kinerja perusahaan meningkat. Informasi yang diungkapkan oleh perusahaan sangatlah penting, karena informasi tersebut nantinya akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan keputusan untuk investasi pihak diluar perusahaan (Theresia & Nuritomo, 2016).

Teori sinyal merupakan pengembangan dari teori keagenan dimana teori ini berkaitan dengan hubungan antara manajemen dan penerima informasi yang menunjukkan adanya asimetri informasi antara pihak manajemen perusahaan dan berbagai pihak yang berkepentingan, berkaitan dengan informasi yang dikeluarkan tersebut. Dasar teori signal adalah ketidak seimbangan perolehan informasi yang menjadi alasan bagi pihak manajemen untuk mengungkapkan informasi melalui laporan keuangan. Ketidak seimbangan informasi dapat terjadi diantara dua kondisi ekstern yaitu perbedaan informasi yang kecil sehingga tidak mempengaruhi manajemen, atau perbedaan yang sangat signifikan sehingga dapat berpengaruh terhadap manajemen (Sartono, 2002).

Kaitannya dari teori signal dengan penelitian ini adalah dalam teori signal dijelaskan mengenai pentingnya pemberian informasi yang harus diberikan kepada pihak dalam dan pihak luar. Pihak dalam dalam hal ini yaitu pemerintahan itu sendiri sedangkan pihak luar yaitu DPRD, bawasda dan masyarakat. Salah satu jenis informasi yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah yang dapat menjadi signal bagi pihak luar, terutama bagi pihak yang berkepentingan adalah laporan tahunan. Laporan tahunan hendaknya memuat informasi yang relevan dan mengungkapkan informasi yang dianggap penting untuk diketahui oleh pengguna laporan baik pihak dalam maupun pihak luar. Semua pengguna informasi keuangan tentunya memerlukan informasi untuk

mengetahui kinerja pemerintah daerah tersebut, sehingga pengguna informasi keuangan dapat mengukur transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan Kota Yogyakarta (Indria, 2018).

Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Mardiasmo (2002;30) transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. transparansi merupakan bentuk keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan pengeluaran daerah sehingga publik dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang rencana anggaran pemerintah daerah dalam suatu tahun anggaran tertentu (Ayem, 2017).

Transparansi di Indonesia mulai berkembang sejak timbulnya reformasi dibidang politik dan ekonomi pada pertengahan tahun 1997 dan merupakan dua prinsip utama pemerintahan yang baik (good governance). Azas keterbukaan (transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara (Halmawati & Mustin, 2015).

Dalam memberikan layanan kepada masyarakat, pemerintah daerah dituntut lebih responsif atau cepat dan tanggap. Terdapat 3 (tiga) mekanisme yang dapat dilaksanakan daerah agar lebih responsif, transparan, dan akuntabel serta selanjutnya dapat mewujudkan good governance yaitu (BPKP, 2006): (1) mendengarkan suara atau aspirasi masyarakat serta membangun kerjasama pemberdayaan masyarakat, (2) memperbaiki internal rules dan mekanisme pengendalian, dan (3) membangun iklim kompetisi dalam memberikan layanan terhadap masyarakat serta marketisasi layanan. Ketiga mekanisme tersebut saling berkaitan dan saling menunjang untuk memperbaiki efektivitas pengelolaan pemerintahan daerah (Pradita et al, 2019).

Trilogi Kepemimpinan

Ki Hadjar Dewantara memeberikan 3 prinsip dasar (Trilogi) kepemimpinan. Pertama adalah ing ngarsa sung tuladha. Artinya, di depan memberi teladan. Seorang pemimpin adalah lokomotif yang berada pada bagian depan, yang akan mengarahkan pada reel yang seharusnya di lalui. Pemimpin merupakan orang yang akan di lihat oleh seluruh orang di pimpinnya, sehingga ia harus menjadi contoh, pembimbing bagi yang di pimpinnya. Sebagai pemimpin, kadang-kadang kita perlu berdiri didepan dan memimpin pasukan ini penting, terutama jika pasukan kita terdiri dari orang-orang yang kurang berpengalaman. Dengan tekad yang kuat seorang harus mampu melaksanakan kerja yang paling banyak dan berat serta menegakan disiplin dengan menjadikannya sebagai teladan yang patut untuk di contoh (Taryatman & Rahim, 2020).

Kedua adalah ing madya mangun karsa. Artinya di tengah membangun kehendak atau niat. Sebagai pemimpin, kita perlu ditengah-tengah pasukan untuk membangkitkan semangat berjuang. Yang perlu dilakukan pemimpin adalah membangun membangkitkan semangatnya agar mereka tidak jatuh terpuruk, sehingga mereka akan menjadi kuat. Seorang pemimpin harus bisa merangkul yang dipimpinnya, mau menerima kritik dan saran serta mau berkerja sama (Foreska & Hangestiningih, 2012).

Ketiga adalah tut wuri handayani. Artinya dari belakang memberikan dorongan dan kekuatan. Seorang pemimpin harus bisa menempatkan diri dibelakang untuk mendorong individu-individu untuk organisai yang dipimpinnya berada didepan untuk memperoleh kemajuan dan prestasi. Pemimpin yang baik adalah yang mampu menyiapkan pemimpin selanjutnya yang lebih baik dari dirinya serta memberi ilmu dan bekal untuk menambah wawasan dan kepintaran mereka (Masitoh & Cahyani, 2020).

Aksebilitas Laporan Keuangan Daerah

Rohman (2009) dalam Aliyah dan Nahar (2012), mengemukakan bahwa aksesibilitas dalam perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar. Menurut Mardiasmo (2002;171),

laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah (Ayem, 2017).

Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media, seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, dan website (internet); dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (Purba, Agusti, & Rofika, 2021). Agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, pemerintah daerah harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya, tidak sekedar menyampaikannya ke DPRD saja, tetapi juga memfasilitasi masyarakat luas agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah (Aliyah dan Nahar, 2012).

Pengaruh Trilogi Kepemimpinan Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan

Trilogi kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mendorong sejumlah orang agar dapat bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terarah pada tujuan bersama serta untuk terlibat dalam suatu masalah ataupun keadaan tertentu. Islam *et al* (2021) menyebutkan bahwa kepemimpinan transformasional memiliki pengaruh yang signifikan pada kepercayaan karyawan terhadap kepemimpinan dan perilaku juara selama perubahan organisasi. Pada suatu organisasi trilogi kepemimpinan mencakup aspek tujuan organisasi, nilai-nilai dan gaya kepemimpinan untuk mencapai suatu manajemen atau gaya kepemimpinan. Pada lingkungan yang etis individu dalam organisasi cenderung untuk mengikuti peraturan dalam organisasi (Marliani & Djadjuli, 2019).

Partha & Noviri (2017) menjelaskan transparansi informasi diartikan sebagai ketersediaan informasi mengenai perusahaan bagi pengguna publik serta menjadi tata kelola perusahaan yang efektif untuk mengurangi konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajer. Theresia & Nuritomo (2016) menjelaskan bahwa konflik keagenan ini muncul karena adanya masalah keagenan. Dalam menghadapi masalah keagenan, transparansi informasi dapat mengurangi konflik keagenan antara pemegang saham dan manajer ataupun pemangku kepentingan lainnya agar nilai pasar yang menggeser arus kas dapat disesuaikan melalui pengambilan keputusan manajemen.

Fraud adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan atau luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain (Maliawan, 2017). Pada kenyataannya, fraud hampir terdapat di setiap link pada suatu organisasi, dan dapat dilakukan oleh siapa saja, bahkan oleh seorang pegawai yang tampaknya jujur sekalipun. Pencegahan fraud dapat dilakukan dengan mengaktifkan dan menerapkan gaya kepemimpinan yang memiliki posisi sangat penting yang selalu diterapkan dalam kehidupan organisasi atau pemerintahan. Seperti konsep kepemimpinan oleh Ki Hadjar Dewantara dalam filosofinya ialah Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tutwuri Handayani yang artinya di depan menjadi teladan, di tengah memberi bimbingan, di belakang memberi dorongan. Ketiga filosofi itu terdapat hubungan antar manusia, yaitu hubungan mempengaruhi dan keteladanan antara pemimpin dan anggotanya karena dipengaruhi oleh kewibawaan pemimpin dan cara pemimpin mengelola lembaga atau organisasi (Suwanto, 2018). Gaya kepemimpinan menunjukkan, secara langsung maupun tidak langsung terkait keyakinan seorang pimpinan terhadap kemampuan bawahannya (Susanto *et al*, 2023). Dilihat dari sudut pandang teori keagenan, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara masyarakat dengan pemerintah daerah adalah seperti hubungan antara *principal* dan *agent*. Masyarakat adalah *principal* dan pemerintah daerah adalah *agent*. *Principal* memberikan wewenang pengaturan kepada *agent* dan memebrikan sumber daya kepada *agent* (dalam bentuk pajak dan lain sebagainya). Pemerintah daerah selaku *agent* memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, m enyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi sebagai wujud dari

pertanggungjawaban atas wewenang yang sudah diberikan, pemerintah daerah harus memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap masyarakat. Dengan begitu masyarakat dapat menilai, mengukur dan mengawasi sampai sejauh mana pemerintah daerah tersebut mengelola sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan (Indria, 2018).

Penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan Vini *et al* (2021) yang menunjukkan trilogi kepemimpinan berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Masitoh & Cahyani (2020) yang menemukan trilogi kepemimpinan tidak memiliki pengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Berdasarkan pemaparan diatas, maka hipotesis penelitian yang pertama adalah sebagai berikut:

H1: Trilogi Kepemimpinan Berpengaruh Positif Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan.

Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan

Rohman (2009), mengemukakan bahwa aksesibilitas dalam perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar. Disisi lain, Mulyana (2006) mengemukakan bahwa aksesibilitas dalam laporan keuangan sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan.

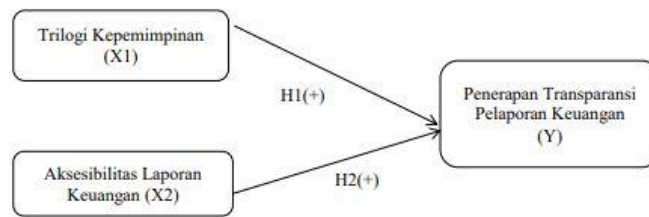
Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Aliyah dan Nahar (2012), aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara bersama-sama atau simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Oktavia & Aliyah, 2022). Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas jika pemerintah daerah terus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya dapat dilakukan antara lain dengan cara memfasilitasi berbagai pihak yang berkepentingan agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah (Ayem 2017).

Hubungan teori sinyal dengan transparansi pelaporan keuangan adalah jika perusahaan mampu memberikan sinyal yang baik mengenai informasi laporan keuangan pada pihak luar berupa informasi keuangan, maka perusahaan dapat dipercaya sehingga akan mengurangi ketidakpastian mengenai prospek perusahaan di masa depan. Transparansi pelaporan keuangan dapat membuat pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal dipermudah dalam mengakses informasi, maka hal tersebut dapat menurunkan risiko yang diakibatkan oleh asimetri informasi. Informasi yang diungkapkan oleh perusahaan sangatlah penting, karena informasi tersebut nantinya akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan keputusan untuk investasi pihak diluar perusahaan (Theresia & Nuritomo, 2016).

Penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan Ayem dan Ledo (2017) yang menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. Hasil ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Indria (2018) yang menemukan bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah tidak memiliki pengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut.

H2: Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Gambar 1. Kerangka Berpikir



Metodologi Penelitian

Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu minat memilih konsentrasi perpajakan. Variabel independen dalam penelitian ini adalah gaya mengajar dosen, motivasi karir, teman sebaya. Pengukuran variabel menggunakan instrumen skala Likert dari 1-5 point dengan pilihan jawaban sangat setuju (SS), setuju (S), netral (N), tidak setuju (TS), sangat tidak setuju (STS).

Definisi Operasional

Transparansi pelaporan keuangan adalah tingkat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang bersifat komprehensif dan mencakup kebijakan serta penggunaan publik (Indria, 2018).

Trilogi kepemimpinan adalah kemampuan untuk mendorong sejumlah orang agar dapat bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terarah pada tujuan bersama serta untuk terlibat dalam suatu masalah ataupun keadaan tertentu (Sutikno, 2003).

Aksesibilitas laporan keuangan adalah kemampuan untuk memberikan akses bagi stakeholder untuk mengetahui atau memperoleh laporan keuangan sebagai bagian dari partisipasi stakeholder (Indria, 2018).

Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pegawai di SKPD yang berada di Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Metode Analisis Data

Uji Kualitas Data

Untuk melakukan uji kualitas data atas data primer, maka penelitian ini menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas (Ghozali, 2016).

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Apabila ingin mengetahui apakah residual berdistribusi normal maka dalam penelitian ini digunakan uji statistik *kolmogorov smirnov*. Residual yang normal adalah yang memiliki nilai signifikan 0,05 (Ghozali, 2016).

Uji Multikolonearitas

Uji multikolonearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Apabila ingin menguji adanya multikolonearitas dapat dilihat melalui nilai *varian inflations faktor (VIF)* < 10 dan yang *tolerance* > 0,1. Apabila terdapat korelasi yang tinggi sesama variabel atau menambah variabel bebas (Ghozali, 2016).

Uji Heteroskedasitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut homoskedastisitas atau jika tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).

Uji Hipotesis

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat (Ghozali, 2016). Apabila F hitung lebih besar dari F tabel maka hipotesis diterima.

Uji Parsial (Uji t)

Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel dependen secara parsial. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel masing-masing independen yaitu gaya mengajar dosen, motivasi karir, teman sebaya dan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu pemilihan konsentrasi perpajakan.

Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dapat menerangkan atau menjelaskan variasi variabel dependen. Dalam kenyataan nilai *Adjusted R²* dapat bernilai negatif, walaupun yang dikehendaki harus bernilai positif. Jika dalam uji empiris didapat nilai *Adjusted R²* negatif, maka nilai *Adjusted R²* dianggap bernilai nol. Secara matematis jika $R^2 = 1$, maka $Adjusted R^2 = R^2 = 1$ sedangkan jika nilai $R^2 = 0$, maka $Adjusted R^2 = (1 - k) / (n - k)$. Jika $k > 1$, maka *Adjusted R²* akan bernilai negative (Ghozali, 2016).

Hasil Dan Pembahasan

Pelaksanaan Penelitian

Responden dalam penelitian ini adalah Staff Bagian Keuangan di SKPD Kota Madya Yogyakarta, Kab. Bantul, Kab. Sleman, Kab. Kulon Progo dan Kab. Gunungkidul. Data kuisioner yang dapat diolah berasal dari 89 responden. Karakteristik dari responden yang menjadi sampel dapat dilihat dari demografi responden. Demografi responden yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan dan pendapatan. Karakteristik responden dapat dilihat selengkapnya pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1

Karakteristik Responden

Data Deskriptif	Keterangan	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-laki	41	46%
	Perempuan	48	54%
Pendidikan Terakhir	SMA	17	19%
	D3	18	20%
	S1	46	52%
	S2	8	9%
	Lainnya	0	0
Masa Kerja	1-3 tahun	31	35%
	4-5 tahun	13	15%
	>5 tahun	45	50%
Usia	20-25 tahun	22	25%
	26-30 tahun	19	21%
	31-35 tahun	9	10%
	36-40 tahun	11	12%
	>40 tahun	28	32%

Sumber: Data primer diolah, 2023

Hasil Uji Statistika Deskriptif

Statistik dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel-variabel penelitian antara *mean*, nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi. Hasil statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2

Statistika Deskriptif

N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
---	---------	----------	------	----------------

Transparansi Pelaporan Keuangan	89	27,00	45,00	37,6966	4,16535
Trilogi Kepemimpinan	89	21,00	35,00	27,9326	3,15795
Aksebilitas Laporan Keuangan Daerah	89	21,00	35,00	30,2921	3,13775
Valid N (<i>listwise</i>)	89				

Sumber: Data primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel 3 tersebut, maka diketahui bahwa transparansi pelaporan keuangan memiliki rata-rata 37,69 dengan standar deviasi 4,16535. Rata-rata trilogi kepemimpinan sebesar 27,93 dengan standar deviasi 3,15. Selanjutnya aksebilitas laporan keuangan daerah memiliki rata-rata 30,29 dengan standar deviasi 3,13.

Uji Validitas

Penyebaran kuesioner dalam penelitian ini sebanyak 89 kuesioner dengan jumlah kuesioner yang dapat diolah sebanyak. Tabulasi data dari kuesioner tersebut menggunakan bantuan *Software Microsoft Excell* 2016 dan diolah dengan menggunakan program SPSS versi 20.0. Sebelumnya, telah dilakukan uji pilot test dari 30 kuesioner yang dapat diolah pada penyebaran kuesioner. Setelah instrumen penelitian ini dapat digunakan penelitian selanjutnya, maka dapat disajikan mengenai uji validitas dari 89 kuesioner pada tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil Uji Validitas

No	Variabel/ Indikator	<i>Pearson Correlatin</i>	R – table	Keterangan
1.	Transparansi Pelaporan Keuangan			
	Butir 1.1	0,830	0,2084	Valid
	Butir 1.2	0,728	0,2084	Valid
	Butir 1.3	0,858	0,2084	Valid
	Butir 1.4	0,841	0,2084	Valid
	Butir 1.5	0,855	0,2084	Valid
	Butir 1.6	0,799	0,2084	Valid
	Butir 1.7	0,705	0,2084	Valid
2.	Trilogi Kepemimpinan			
	Butir 2.1	0,840	0,2084	Valid
	Butir 2.2	0,876	0,2084	Valid
	Butir 2.3	0,874	0,2084	Valid
	Butir 2.4	0,889	0,2084	Valid
	Butir 2.5	0,858	0,2084	Valid
	Butir 2.6	0,870	0,2084	Valid
	Butir 2.7	0,806	0,2084	Valid
	Butir 2.8	0,829	0,2084	Valid
	Butir 2.9	0,820	0,2084	Valid
3.	Aksebilitas Laporan Keuangan Daerah			
	Butir 3.1	0,693	0,2084	Valid
	Butir 3.2	0,747	0,2084	Valid
	Butir 3.3	0,707	0,2084	Valid
	Butir 3.4	0,793	0,2084	Valid
	Butir 3.5	0,745	0,2084	Valid
	Butir 3.6	0,638	0,2084	Valid
	Butir 3.7	0,630	0,2084	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.4 tersebut, dapat disimpulkan bahwa semua butir pernyataan valid. Butir pernyataan yang valid ditunjukkan dengan nilai *pearson correlation* yang berada di atas r-tabel dan nilai signifikannya di bawah nilai alpha yaitu 0,05, sedangkan pernyataan yang tidak valid maka sebaliknya.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan dengan bantuan SPSS versi 17.0 berdasarkan hasil *output* SPSS yang akan dipaparkan dalam tabel 4.4. pada tabel tersebut menunjukkan bahwa semua variabel pada penelitian ini reliabel. Hal ini hal ini dijelaskan melalui nilai *Cronbach's Alpha* yang semuanya lebih dari lebih tinggi dari 0,600.

Tabel 4
Hasil Uji Reliabilitas

No.	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1.	Transparansi Pelaporan Keuangan	0,908	Reliabel
2.	Trilogi Kepemimpinan	0,951	Reliabel
3.	Aksebilitas Laporan Keuangan Daerah	0,834	Reliabel

Sumber: Data primer diolah, 2023

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas Data, dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogrov-smirnov z*. Hasil pengujian dari *Kolmogrov-smirnov z* menunjukkan nilai *Asym. Sig. (2-tiled)* 0,058. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, jika nilai signifikansi $< 0,05$ diartikan data tidak berdistribusi normal, signifikansi $0,052 > 0,05$, sehingga dapat diartikan bahwa data berdistribusi secara normal.

Uji Multikolonearitas, hasil uji multikolonearitas menunjukkan nilai *tolerance* variabel independen trilogi kepemimpinan yaitu sebesar 0,766 dan nilai $VIF < 10$ sebesar 1,306 dan nilai *tolerance* aksebilitas laporan keuangan daerah yaitu sebesar 0,766 dan nilai $VIF < 10$ sebesar 1,306. Dengan hasil tersebut, dapat diartikan bahwa tidak terjadi multikolonearitas dalam persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas, ini menggunakan uji *glejser*. Nilai signifikansi trilogi kepemimpinan sebesar 0,054 dan aksebilitas laporan keuangan daerah sebesar 0,999 di atas 0,05 (*Sig. > 0,05*) yang dapat diartikan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model yang digunakan pada pengujian regresi.

Pengujian Hipotesis

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Hasil uji F hitung sebesar 26,407 dan signifikansi 0,000. Sehingga dapat disimpulkan secara simultan variabel independen trilogi kepemimpinan dan aksebilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi pelaporan keuangan.

Tabel 5
Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Model	R	Model Summary		
		R Square	Adjusted Square	R Std. Error of the Estimate
1	,617 ^a	,380	,366	2,49829

a. Predictors: (Constant), Trilogi Kepemimpinan, Aksebilitas Laporan Keuangan Daerah

b. Dependent Variable: Transparansi Pelaporan Keuangan

Sumber: Data primer diolah, 2023

Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh trilogi kepemimpinan dan aksebilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi pelaporan keuangan. Nilai *adjusted R Square* sebesar 0,366 yang berarti pengaruh trilogi kepemimpinan dan aksebilitas pelaporan keuangan memiliki pengaruh sebesar 36,6%. Sedangkan 64,4% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

Tabel 6
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	Model Summary		
		R Square	Adjusted Square	R Std. Error of the Estimate
1	,617 ^a	,380	,366	2,49829

a. Predictors: (Constant), Trilogi Kepemimpinan, Aksebilitas Laporan Keuangan Daerah

b. Dependent Variable: Transparansi Pelaporan Keuangan

Sumber: Data primer diolah, 2023

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 7
Uji Parsian (Uji t)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	10,472	2,780		3,767	,000
1 Trilogi Kepemimpinan	,351	,073	,466	4,801	,000
Aksebilitas Laporan Keuangan Daerah	,236	,096	,238	2,450	,016

a. Dependent Variable: Transparansi Pelaporan Keuangan

Sumber: Data primer diolah, 2023

Berdasarkan hasil regresi seperti tertera pada tabel 4.9 diperoleh persamaan model regresi sebagai berikut:

$$\text{Transparansi Pelaporan Keuangan (Y)} = 10,472 + 0,351X_1 + 0,236X_2 + \epsilon$$

1. Konstanta sebesar 10,472 artinya jika trilogi kepemimpinan dan aksebilitas laporan keuangan daerah tidak ada maka transparansi pelaporan keuangan sebesar 10,472.
2. Koefisien regresi X_1 sebesar 0,351 artinya setiap kenaikan satu satuan trilogi kepemimpinan akan meningkatkan transparansi pelaporan keuangan sebesar 0,351. Sebaliknya, setiap penurunan satu satuan trilogi kepemimpinan akan menurunkan transparansi pelaporan keuangan sebesar 0,351, dengan anggapan bahwa X_2 tetap.
3. Koefisien regresi X_2 sebesar 0,236 artinya setiap kenaikan satu satuan aksebilitas laporan keuangan daerah akan meningkatkan transparansi pelaporan keuangan sebesar 0,236. Sebaliknya setiap penurunan satu satuan aksebilitas laporan keuangan daerah, akan menurunkan transparansi pelaporan keuangan sebesar 0,236 dengan anggapan bahwa X_1 tetap. Tanda (+) menunjukkan arah hubungan yang searah sedangkan tand (-) menunjukkan arah hubungan yang berbanding terbalik, antar variabel independen (X) dengan variabel dependen Y .

Pembahasan

Pengaruh Trilogi Kepemimpinan Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan

Trilogi kepemimpinan mempengaruhi transparansi pelaporan keuangan daerah. Hal ini didasarkan pada data yang diperoleh yaitu variabel transparansi pelaporan keuangan memiliki nilai koefisien regresi beta sebesar 0,351 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Berdasarkan kriteria hipotesis pertama H_1 **terdukung**. Hal ini disebabkan semakin baik trilogi kepemimpinan yang diterapkan pada suatu organisasi, hal ini menunjukkan hubungan mempengaruhi dan keteladanan antara pemimpin dan anggotanya karena dipengaruhi oleh kewibawaan pemimpin dan cara pemimpin mengelola lembaga atau organisasi (Choirunnisa, 2021).

Trilogi kepemimpinan berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Hal ini disebabkan semakin baik trilogi kepemimpinan yang diterapkan pada suatu organisasi, hal ini menunjukkan hubungan mempengaruhi dan keteladanan antara pemimpin dan anggotanya karena dipengaruhi oleh kewibawaan pemimpin dan cara pemimpin mengelola lembaga atau organisasi. Gaya kepemimpinan menunjukkan, secara langsung maupun tidak langsung terkait keyakinan seorang pimpinan terhadap kemampuan bawahannya.

Seperti konsep kepemimpinan oleh Ki Hadjar Dewantara dalam filosofinya ialah Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tutwuri Handayani yang artinya di depan menjadi teladan, di tengah memberi bimbingan, di belakang memberi dorongan. Ketiga filosofi itu terdapat hubungan antar manusia, yaitu hubungan mempengaruhi dan keteladanan antara pemimpin dan anggotanya karena dipengaruhi oleh kewibawaan pemimpin dan cara pemimpin mengelola lembaga atau organisasi (Suwanto, 2018). Gaya kepemimpinan menunjukkan, secara langsung maupun tidak langsung terkait keyakinan seorang pimpinan terhadap kemampuan bawahannya (Susanto *et al*, 2023).

Hubungannya dengan teori agensi dapat mencerminkan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah daerah yang maknanya sama dengan hubungan antara *principal* dan *agent*. Masyarakat adalah *principal* dan pemerintah daerah adalah *agent*. *Principal* memberikan wewenang pengaturan kepada *agent* dan memberikan sumber daya kepada *agent* (dalam bentuk pajak dan lain sebagainya). Pemerintah daerah selaku *agent* memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi sebagai wujud dari pertanggungjawaban atas wewenang yang sudah diberikan, pemerintah daerah harus memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap masyarakat. Dengan begitu masyarakat dapat menilai, mengukur dan mengawasi sampai sejauh mana pemerintah daerah tersebut mengelola sumber daya agar kesejahteraan dapat meningkat (Indria, 2018).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Vini *et al* (2021) dan Sutikno (2003) menemukan bahwa trilogi kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan. Sekaligus menolak penelitian Masitoh & Cahyani (2020) yang menyatakan trilogi kepemimpinan tidak memiliki berpengaruh positif terhadap transparansi pelaporan keuangan.

Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan

Aksesibilitas laporan keuangan mempengaruhi transparansi pelaporan keuangan daerah. Hal ini didasarkan pada data yang diperoleh yaitu variabel transparansi pelaporan keuangan memiliki nilai koefisien regresi beta sebesar 0,236 dengan nilai signifikansi $0,016 < 0,05$. Berdasarkan kriteria hipotesis kedua H2 **terdukung**. Selanjutnya, keadaan sekarang menunjukkan bahwa seberapa baik ketersediaan laporan keuangan dalam suatu organisasi akan mempengaruhi transparansi pelaporan keuangan pada instansi yang bersangkutan (Wardani & Ambarwati, 2017).

Transparansi pelaporan keuangan yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami. Dengan akses yang baik, mudah diperoleh, mudah dibaca dan mudah dipahami mencerminkan transparansi pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahannya, sehingga dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah dapat dinilai apakah pemerintah daerah tersebut berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Jadi, Semakin baik aksesibilitas laporan keuangan maka akan meningkatkan transparansi pelaporan keuangan daerah (Purba *et al*, 2021).

Hubungan teori sinyal dengan transparansi pelaporan keuangan yaitu apabila perusahaan mampu memberikan sinyal yang bagus terkait informasi laporan keuangan pada pihak luar berupa informasi keuangan, maka perusahaan dapat dipercaya sehingga akan mengurangi ketidakpastian mengenai prospek perusahaan di masa depan. Transparansi pelaporan keuangan jugadapat membuat pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal dipermudah dalam mengakses informasi, maka hal tersebut dapat menurunkan risiko yang diakibatkan oleh asimetri informasi. Informasi yang diungkapkan oleh perusahaan sangatlah penting, karena informasi tersebut nantinya akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan keputusan (Theresia & Nuritomo, 2016).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ayem dan Ledo (2017) menemukan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan. Selain itu peneliti ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Purba *et al* (2021) yang menemukan bahwa aksesibilitas laporan keuangan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Indria (2018) yang transparansi pelaporan keuangan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut Trilogi kepemimpinan berpengaruh positif terhadap transparansi pelaporan keuangan. Hal ini disebabkan semakin baik trilogi kepemimpinan yang diterapkan pada suatu organisasi hal ini menunjukkan

hubungan mempengaruhi dan keteladanan antara pemimpin dan anggotanya karena dipengaruhi oleh kewibawaan pemimpin dan cara pemimpin mengelola lembaga atau organisasi. Aksebilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap transparansi pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pemerintah memberikan kemudahan kepada pengguna untuk mengakses laporan keuangan, maka akan meningkatkan transparansi laporan keuangan.

Keterbatasan

Keterbatasan penelitian ini adalah sampel pada penelitian ini hanya menggunakan Staff SKPD Bagian Keuangan Di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya di Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunungkidul, dan Kota Madya Yogyakarta, karena jika meneliti Jawa Tengah dan sekitarnya yang wilayahnya sangat luas dengan waktu penelitian yang terbatas dalam pengerjaan skripsi ini dengan kondisi kualitatif atau terjun langsung ke lapangan sangat sulit.

Saran

Saran bagi penelitian selanjutnya yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai transparansi pelaporan keuangan disarankan untuk menambah wilayah yang akan dijadikan sampel penelitian. Tidak hanya di Staff SKPD Bagian Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta di masing-masing Kabupaten saja, tetapi penyebaran kuisioner bisa dilakukan di area Jawa Tengah dan sekitarnya.

Daftar Pustaka

- Andriyani, L., Nur, E., & Anggraini, L. (2016). Pengaruh Tekanan Eksternal, Komitmen Manajemen, Ketidakpastian Lingkungan, Gaya Kepemimpinan, dan Aksebilitas Laporan Keuangan Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. *JOM Fekon*, 3(1).
- Auditya, L., Husaini, & Lismawati. (2013). Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Fairness*, 3(1), 22–41.
- Choirunnisa. (2021). Pengaruh Penyajian dan Aksebilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Padangsidempuan. *1-76*.
- Erawati, T., & Latifah, A. I. (2018). Pengaruh Perencanaan Pajak (Tax Planning) terhadap Nilai Perusahaan dengan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Akuntansi*, 1–13.
- Fajaruddin. (2021). Konsep Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Dan Humaniora 2021*, 659–668.
- Foreska, A., & Hangestiningsih, E. (2012). Eksplorasi Trilogi Kepemimpinan Tamansiswa Melalui Peran Kepala Sekolah di SD Negeri Gedongkiwo. *Jurnal Pendidikan Ke-SD-An*, 6(1), 712–716.
- Halmawati, & Mustin, F. A. (2015). Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Dalam Perspektif Tekanan Eksternal dan Komitmen Organisasi. *Book of Proceedings*, 547–557.
- Herlina, R., Taufik, T., & Nasir, A. (2021). Pengaruh Transparansi, Kompetensi dan Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Economic, Business and Accounting*, 4(2), 419–433. <https://doi.org/10.31539/costing.v4i2.1965>
- Indria, N. A. (2018). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksebilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, 1–131.
- Luthfiyah, F. (2020). Konsep Pendidikan Saat Ini dan Harapan Pendidikan Masa Mendatang, (April), 1–6.
- Marliani, L., & Djadjuli, D. (2019). Menakar Trilogi Kepemimpinan Ki Hajar Dewantara di Era Globalisasi. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 10(2), 81–87.
- Masitoh, S., & Cahyani, F. (2020). Penerapan Sistem Among dalam Proses Pendidikan Suatu Upaya Mengembangkan Kompetensi Guru. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 08(01), 122–141.

- Oktavia, W. T., & Aliyah, S. (2022). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah. *Among Makarti*, 15(2), 65–82.
- Partha, I. G. A., & Noviani, N. (2017). Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Akuntansi Udayana*, 18(2), 1398–1425.
- Pradita, K. D., Hartono, A., & Mustoffa, A. F. (2019). Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan dan Komitmen Manajemen Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(2), 87–100.
- Purba, M., Agusti, R., & Rofika, R. (2021). Penyajian Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal dan Akseibilitas Laporan Keuangan Pada Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *E ISSN 2721-1819*, 2(3), 418–434.
- Susanto, E. W., Kirana, K. C., & Hadi, S. (2023). Pengaruh Keadilan Organisasi, Trilogi Kepemimpinan Ki Hajar Dewantara Terhadap Motivasi Berprestasi Melalui Lingkungan Kerja Fisik. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 8(1).
- Sutikno, K. (2003). Tapak dan Tutar, 1–242.
- Suwarto. (2018). Proses Belajar Mengajar dalam Perspektif Sistem Among. *Prosifing Seminar Nasional KALUNI*, 1(April 2018), 1–6. <https://doi.org/10.30998/prossnp.v1i0.46>
- Taryatman, & Rahim, A. (2020). Implementasi Ajaran Tamansiswa Tri Nga Pada Pembelajaran Pendidikan Jasmani. *Jurnal Pendidikan Ke-SD-An*, 6(2), 856–859. <https://doi.org/10.30738/trihayu.v6i2.8058>
- Theresia, O., & Nuritomo. (2016). Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Informasi Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015, 1–18.
- Wardani, D. K., & Ambarwati, H. (2017). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Niat Wajib Pajak untuk menggunakan E-Filing. *Jurnal Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Untuk Menggunakan E-Filing*, 1(157), 1–11
- Wulaningrum, P. D., & Pinanto, A. (2020). Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Pada Organisasi Pengelola Zakat : Studi Komparatif di BAZ dan LAZ Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 03(1), 15–24. <https://doi.org/10.18196/jati.030122>